# Buletin Isen Mulang

Edisi 300
Oktober 2019

**Buletin Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah**

diterbitkan ; Biro Protokol dan Komunikasi Publik Setda Provinsi Kalimantan Tengah

**Susunan Dewan Redaksi Buletin Pemprov Kalteng "Isen Mulang"**

***Pelindung :***

Gubernur Kalimantan Tengah

***Penasehat :***

Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah

***Pengarah :***

Asisten Adminidtrasi Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah

Sekda Prov. Kalteng

***Penanggung Jawab:***

Kepala Biro Protokol dan Komunikasi Publik Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah

**Pemimpin Redaksi:**

Kepala Bagian Penyaringan Informasi dan Publikasi pada Biro Protokol dan Penyaringan Informasi dan Publikasi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah

***Sekretaris Redaksi:***

Kepala Sub Bagian Informasi Pemerintahan dan Umum pada Biro Protokol dan Penyaringan Informasi dan Publikasi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah

***Wakil Sekretaris Redaksi:***

Kepala Sub Bagian Media dan Dokumentasi pada Biro Protokol dan Penyaringan Informasi dan Publikasi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah

***Koordinator Distribusi :***

Kepala Sub Bagian Informasi Ekonomi, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat Biro Protokol dan Penyaringan Informasi dan Publikasi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah

***Staf Pelaksana :***

Muliyani, S.Sos, Eka Supriyaningsih,

Joko Prabowo, Nova Anggreni, Benito Zuares

***Alamat Redaksi :***

Jl. RTA Milono No. 1 Palangka Raya
Telp/Fax (0536) 4200241

**Ijin Penerbitan Khusus**
**No. 2114/SK/Dirjen PPG/STT/1995**

# Daftar Isi ;

Jambore Inovasi Kalimantan Tengah Tahun 2019 ____3

Sekda Ingatkan Pejabat Baru Percepat Adaptasi di Akhir Tahun Anggaran_____4

Gubernur : Harmonisasi Antara Legislatif dan Eksekutif Perlu Dijaga_____5

Gubernur : Pembentukan dan Pembinaan Desa Sadar Hukum Menjadi Prioritas____6

Pemerintah Apresiasi Pelibatan Perempuan sebagai Agen Perdamaian_____7

Gubernur Kalteng Apresiasi Kinerja ASN____7

Gubernur Minta Pejabat Jauhi Pungli dan Korupsi_____8

Gubernur Resmikan Gedung Disperkimtan Kalteng____9

Pemda Kalteng dan Penyelenggaran PILKADA 2020 Tandatanganii NPHD_____9

Kwarda Gerakan Pramuka Kalteng Gelar Gebyar Pesta Siaga_____10

Kalteng Siap Suguhkan Destinasi Wisata Kelas Dunia_____11

Kalteng Bersiap Hadapi Revolusi Industri 4.0 dan Society 5.0_____12

Gubernur Kalteng Lantik Kepala SMA, SMK dan SLB Se-Kalteng_____13

Wisuda Pascasarjana Ke IV, Sarjana Ke XXVII dan Diploma Ke XVIImmUniversitas Muhammadiyah Palangka Raya Tahun 2019_____14

Festival Kesatuan Pengelolaan Hutan Kalimantan Tengah Tahun 2019_____15

Pembukaan Lomba - lomba Memperingati Hari Kesehatan Nasional ke 55 Tahun 2019_____16

Proyek Pembangunan RS Kelas A di Kalteng Masuki Tahap Penyiapan_____17

Ketua TP PKK Kalteng Resmikan Posyandu Lansia Ar Rasyid_____17

Rapat Koordinasi Evaluasi Pelaksanaan Program 8 Aksi Konvergensi Percepatan Pencegahan Stunting Tahun 2019 dan Rencana Tindak Lanjut Tahun 2020 di Provinsi Kalimantan Tengah_____18

Gubernur : Keberhasilan Diraih Dengan Tekad, Komitmen dan Kerja Keras_____19

biropkp.kalteng.go.id  sekretariat.daerah.kalteng  @biropkp_kalteng

protokol komunikasi publik kalteng  buletin.isenmulang@gmail.com

Redaksi menerima naskah tulisan dari Dinas, Badan, Instansi, Biro dan Kantor Unit Satuan Kerja baik berupa Artikel, Feature maupun Foto yang menunjang kemajuan Buletin Isen Mulang dan Redaksi berhak mengedit Naskah yang masuk. Kiriman Naskah Tulisan maupun Foto disampaikan ke Sub Bagian Informasi Pemerintahan Umum Biro Protokol dan Komunikasi Publik Setda Prov Kalteng Jl. RTA Milono No.1 Palangka Raya, Telp/Fax (0536) 4200241

# Jambore Inovasi Kalimantan Tengah Tahun 2019

Penyelenggaraan Jambore Inovasi Kalimantan (JIK) Tahun 2019 di Provinsi Kalimantan Tengah adalah untuk menampilkan sekaligus mempromosikan Inovasi - inovasi terbaik dari seluruh Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/Kota Se-Kalimantan yang diyakini mampu mengubah cara pandang pengelolaan di Kalimantan yang sebelumnya dibangun melalui kekuatan sumber daya alam menjadi Kalimantan berkemajuan yang dibangun dengan penuh inovasi, guna dapat dijadikan motivasi dan referensi bagi ASN dan seluruh lapisan masyarakat, melalui berbagai inovatif segenap elemen masyarakat dapat tumbuh dan maju sejajar dengan daerah lain yang sudah maju lebih dulu. Penyelenggaraan Jambore Inovasi Kalimantan (JIK) 2019 dan Program ini diharapkan mendorong ketersedian forum dan penguatan jejaring kerja Inovasi Kalimantan, demi meningkatkan kepercayaan publik terhadap berbagai inovasi yang terus dilakukan oleh alumni Diklatpim.

"Selamat Datang dan Terima kasih kepada Pimpinan dan Jajaran Lembaga Administrasi Negara RI atas kerjasama dan kepercayaan yang diberikan kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah untuk menjadi tuan rumah penyelenggaraan Jambore Inovasi Kalimantan (JIK) 2019, Semoga kerjasama yang telah terjalin ini terus ditingkatkan, guna mendorong semangat dan komitmen Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Kalimantan Tengah untuk menjadi Pusat Pendidikan dan Pengembangan SDM agar selalu melahirkan kader-kader pemikir Inovasi pada jenjang tingkat Eselon III dan Eselon IV untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat", ungkap Gubernur Kalimantan Tengah Sugianto Sabran dalam sambutannya yang dibacakan Oleh Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Fahrizal Fitri pada Acara Pembukaan Jambore Inovasi Kalimantan Tahun 2109 di Palangka Raya, (23/10/19).

Di tengah globalisasi dan persaingan ekonomi global, menempatkan daya saing daerah menjadi satu keharusan yang tidak bisa ditawar. Kapasitas daya saing daerah salah satunya ditentukan oleh faktor Inovasi. Baik itu dalam upaya pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan berbagai kreativitas baru.

Dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat, maka kita dituntut untuk berinovasi menjadi alternatif untuk menjawab tuntutan masyarakat akan kemudahan dan peningkatan produktivitas, pelayanan publik, maupun mendukung daya saing daerah.

"Oleh sebab itu, Kalimantan Tengah berupaya terus mendukung konsep rutin penyelenggaraan Pameran Produk Inovasi. Maksudnya tentu saja mendorong pengembangan konsep yang dapat memacu kreativitas masyarakat di iptek, serta sebagai sarana promosi hasil karya terbaik di bidang teknologi dan Inovasi daerah", terang Sugianto.

Pemerintah daerah mempunyai tanggung jawab yang berat dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui program/ kegiatan yang ada pada setiap Perangkat Daerah. Dimana dalam melaksanakan program tersebut tentu saja harus melalui tahapan tahapan mulai dari perencanaan, penganggaran, pengadaan barang/ jasa, dan pelaksanaan kegiatan itu sendiri dengan selalu berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga akan didapatkan hasil pembangunan yang berkualitas dan dapat dimanfaatkan secara luas oleh masyarakat.

Inovasi bukan hanya suatu proses untuk menampilkan hasil kerja dan bukan hanya pengetahuan. Inovasi adalah budaya yang harus dibiasakan dalam menuntaskan Program dan Kegiatan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Inovasi merupakan salah satu jalan pelayanan prima, salah satu jalan untuk membuka lapangan pekerjaan dan penyederhanaan birokrasi. Hal lain yang tak kalah penting dari Inovasi adalah guna memberikan kontribusi dalam peningkatan penggunaan produksi dalam negeri, peningkatan peran usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah serta pembangunan berkelanjutan. ***

# Sekda Ingatkan Pejabat Baru Percepat Adaptasi di Akhir Tahun Anggaran

PALANGKA RAYA – Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Fahrizal Fitri memimpin acara Serah Terima Jabatan (Sertijab) Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah di Aula Eka Hapakat Lantai III Kantor Gubenur Kalimantan Tengah, Senin (28/10/2019). Sertijab digelar menyusul pelantikan Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, Jumat (25/10/2019) pekan lalu.

Sekda dalam sambutannya berharap Sertijab yang terbilang cepat ini dapat mempercepat pembahasan anggaran dan adaptasi pemangku jabatan yang baru. “Kita berada di akhir tahun anggaran. Kita punya waktu 1,5 bulan lagi untuk menyelesaikan tahun anggaran dan menyusun kegiatan untuk RAPBD 2020. Saya berharap kita segera melakukan adaptasi terhadap pekerjaan,” ungkap Sekda.

Sekda juga berharap kinerja Setda Provinsi Kalimantan Tengah dapat menjadi contoh bagi SOPD yang lain. “Saya ingin Setda menjadi otak dari pemerintahan di Kalimantan Tengah. Jadi harus betul-betul menunjukkan eksistensi dan kinerja yang cukup baik. Dengan kinerja yang lebih bagus, Setda dapat menjadi contoh daripada SOPD yang lain,” jelasnya.

Pada kesempatan tersebut, Sekda memberikan sejumlah arahan kepada para pejabat yang baru saja melaksanakan Sertijab. Berkaitan dengan ekspose atau rapat Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA) yang akan digelar dalam waktu dekat, Sekda menegaskan bahwa evaluasi ini harus benar-benar dijadikan momentum untuk menentukan capaian kinerja Setda. “Kita akan mengevaluasi capaian kita sampai bulan Oktober. Saya minta input dari Biro Administrasi Pembangunan berkenaan dengan capaian-capaian, baik kegiatan yang dibiayai oleh APBD, DAK, Tugas Pembantuan, ataupun yang lain,” tegasnya.

Selanjutnya berkenaan dengan rilis mengenai inflasi bersama Bank Indonesia awal tahun nanti, Sekda mengingatkan instansi-instansi terkait untuk mengevaluasi tingkat inflasi di Kalimantan Tengah untuk menjaga stabilitas harga dan ketersediaan pangan. “Titik evaluasi untuk inflasi itu adalah di Palangka Raya dan Sampit. Ini adalah bagian untuk menjaga stabilitas terutama stabilitas harga dan ketersediaan pangan,” ucap Sekda.

Berkenaan dengan proyek strategis nasional, yakni proyek perkeretaapian PT PTB (Perkeretaapian Tambun Bungai), dijelaskan Sekda bahwa kereta api ini diperuntukkan untuk umum tetapi lebih diprioritaskan untuk pengangkutan batu bara dari Puruk Cahu di Murung Raya ke Bangkuang di Barito Selatan dan dari Bangkuang ke Batanjung di Kapuas. Pelaksanaan proyek saat ini berada pada tahap pengurusan administrasi perizinan dan dpemenuhan sejumlah persyaratan. Sekda meminta jajaran terkait untuk segera mempelajari untuk proses selanjutnya menyusul tata waktu ground breaking sudah melewati tenggat yang disepakati yakni akhir September 2019.

Selain proyek perkeretaapian, Sekda juga mengingatkan jajarannya yang berkenaan dengan pengadaan barang dan jasa untuk mengevaluasi kemungkinan masih adanya proses pelelangan di akhir tahun anggaran ini. Di samping itu, kinerja pada proses pengadaan barang dan jasa juga diharapkan terus diperbaiki dan ditingkatkan menyusul adanya penilaian oleh KPK. Perbaikan dan evaluasi dalam hal ini juga meliputi peningkatan kapasitas tenaga fungsional Pokja Pengadaan Barang dan Jasa dari lingkup Setda.

Sementara itu, Pejabat Eselon III dan IV di lingkungan Setda Provinsi Kalimantan Tengah yang dilantik seluruhnya berjumlah 25 orang. Eselon III berjumlah 9 orang, yakni Biro LPBJ 3 orang, Biro Hukum 1 orang, Biro Administrasi Perekonomian dan SDA 2 orang, Biro Umum 1 orang, Biro Administrasi Pembangunan 1 orang, serta Biro Protokol dan Komunikasi Publik 1 orang. Sedangkan Eselon IV berjumlah 16 orang, yakni Biro LPBJ 2 orang, Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan 1 orang, Biro Umum 2 orang, Biro Administrasi Pembangunan 2 orang, Biro Protokol dan Komunikasi Publik 5 orang, serta Biro Pemerintahan 2 orang.

Acara Sertijab yang antara lain dihadiri Asisten Setda, Kepala Biro Hukum, dan Kepala Biro Organisasi ini dirangkai dengan penyerahan token CMS Bank Kalteng oleh Sekda Kalimantan tengah kepada Plt. Kepala Biro LPBJ, Plt. Kepala Biro Administrasi Perekonomian dan SDA, serta Plt. Kepala Biro Administrasi Pembangunan.***

# Gubernur : Harmonisasi Antara Legislatif dan Eksekutif Perlu Dijaga.

PALANGKA RAYA – BIRO PKP. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Kalimantan Tengah kembali menyelenggarakan Orientasi Tugas dan Fungsi anggota DPRD Kabupaten dan Kota se-Kalimantan Tengah angkatan ke-2 selama 4 hari mulai tanggal 3 s.d 6 Oktober 2019 di Palangka Raya.

Orientasi bagi Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD Kabupaten/Kota itu sebagai implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 133 Tahun 2017 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.

Orientasi/Pembekalan bagi pimpinan dan anggota DPRD hanya sekali dilakukan pada awal masa jabatan setelah pengucapan Sumpah/Janji anggota DPRD, sekaligus sebagai syarat bagi anggota DPRD mengikuti 6 kegiatan Bimtek Pendalaman Tugas bagi anggota DPRD. Hasil Bimtek tersebut diharapkan dapat memacu semangat kerja para anggota DPRD bersama Kepala Daerah dalam mewujudkan tujuan pembangunan daerah sesuai RPJMD yang telah ditetapkan.

UU Nomor : 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah mempertegas posisi DPRD sebagai salah satu Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah. Pasal 58 UU tersebut menyebutkan Penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota terdiri dari Kepala Daerah dan DPRD dibantu oleh Perangkat Daerah. Sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah, maka DPRD merupakan bagian dari Pemerintahan Daerah sehingga kedudukan DPRD dan Kepala Daerah sama-sama sebagai penyelenggara Pemerintahan Daerah..

Kepala BPSDM Provinsi Kalimantan Tengah Sri Widarnani menjelaskan Orientasi tersebut bertujuan antara lain mengenalkan Tugas Pokok dan Fungsi DPRD sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah, meningkatkan semangat pengabdian kepada bangsa dan NKRI, meningkatkan pemahaman tentang ideologi negara, konstitusi, semangat patriotisme dan wawasan kebangsaan serta membangun komitmen dan kesepakatan semua pemangku kepentingan agar tercapai pembangunan yang optimal dan berkelanjutan di provinsi Kalimantan Tengah.

Kepala Daerah dan DPRD sejatinya adalah "Nahkoda" bahtera birokrasi pemerintahan dalam melaksanakan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat dalam bingkai dan koridor Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) yang disusun dan disahkan bersama dengan Peraturan Daerah. "Untuk itu saya kembali menegaskan bahwa kedudukan DPRD sesuai Undang-Undang Nomor : 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah bahwa Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan DPRD. Artinya kedudukan DPRD dan Kepala Daerah beserta jajarannya adalah sejajar bersama sebagai mitra", tegas Gubernur Sugianto Sabran dalam sambutan tertulis disampaikan Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik dr. Endang Kusriatun ketika membuka Orientasi tersebut di Palangka Raya, Kamis (3/10/2019).

Untuk itu, maka harmonisasi dan sinergitas antara legislatif dan eksekutif sebagai mitra harus dijaga. Menjaga sinergitas kemitraan merupakan keniscayaan yang tidak boleh dibantah. Oleh karena itu menghadirkan jiwa besar dalam pengelolaan pemerintahan daerah sangat diutamakan. Dengan lebih mendahulukan kepentingan kesejahteraan masyarakat ketimbang kepentingan pribadi, egoisme kelompok dan golongan menjadi faktor utama suatu daerah lebih cepat maju dan berdaya saing", ujarnya.

Ditegaskan, Pemerintah Daerah dan DPRD harus saling menghargai dalam menyampaikan kritik dan saran terlebih lagi dalam pembahasan anggaran atau APBD. "Saya berharap pembahasan anggaran jangan sampai berlarut - larut atau bahkan mengalami keterlambatan sehingga masyarakat yang akan terkena dampaknya. Di dalam politik anggaran, tidak jamannya lagi proses penyusunan tertutup, tidak partisipatif dan pragmatis. Proses penyusunan anggaran hendaknya mengikuti kaidah yang sudah ditetapkan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku", jelas Gubernur..

Orientasi yang diikuti 160 orang anggota DPRD dari Kabupaten Kotawaringin Timur, Sukamara, Barito Utara, Barito Selatan, Barito Utara, Gunung Mas dan Kabupaten Pulang Pisau itu dengan narasumber Widyaiswara dari Kementerian Dalam Negeri, BPSDM Provinsi Kalteng dan Pejabat Struktural di lingkup pemerintah Provinsi Kalteng.***

# Gubernur : Pembentukan dan Pembinaan Desa Sadar Hukum Menjadi Prioritas.

PALANGKA RAYA – BIRO PKP. Pembentukan dan pembinaan Kelompok Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum) menjadi Desa Sadar Hukum di provinsi Kalimantan Tengah sangat diperlukan dalam rangka merespon derasnya desakan dari komponen masyarakat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam menyelesaikan berbagai persoalan hukum di semua jenjang pemerintahan serta meningkatkan kesadaran dan hasrat memperoleh perlakuan dan penegakan hukum yang adil dan benar, menjadi kebutuhan pokok yang harus segera terpenuhi.

Gubernur Kalimantan Tengah Sugianto Sabran mengemukakan hal tersebut dalam sambutan tertulis disampaikan Asisten II Sekda Bidang Perekonomian dan Pembangunan Nurul Edy ketika membuka Lomba Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum) Tingkat Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2019 di Palangka Raya, Rabu (25/09/2019).

Disebutkan, Kalimantan Tengah ditinjau dari aspek karakteristik geografis memiliki sejumlah desa yang tersebar dan kendala cukup berat, termasuk dalam masalah-masalah hukum. “Karena itu, pembentukan dan pembinaan kelompok Keluarga Sadar Hukum menjadi Desa Sadar Hukum di provinsi Kalimantan Tengah seyogyanya menjadi prioritas”, tegas Sugianto Sabran.

Suatu Desa atau Kelurahan dikatakan sadar hukum jikalau memenuhi kriteria pelunasan membayar PBB mencapai 90 %, tidak terdapat pernikahan usia dini, angka kriminalitas menurun, rendahnya kasus narkoba dan tingginya kesadaran masyarakat terhadap kebersihan dan kelestarian lingkungan.

Pada era yang semakin modern ini, masyarakat semakin kritis dan peka terhadap hukum walaupun terkadang sikap tersebut secara teoritis ataupun dalam aplikasinya sehari-hari tidak didukung dengan pengetahuan dan pemahaman yang benar tentang hukum. “Pembinaan hukum di lingkungan keluarga adalah solusi yang sangat tepat untuk membantu memecahkan persoalan-persoalan hukum yang dihadapi masyarakat di tanah air, terutama mereka yang berada dalam kategori masyarakat yang kurang memahami hukum dan seringkali terabaikan”, imbuh gubernur.

Lomba Kadarkum tersebut bertujuan memantapkan dan meningkatkan kesadaran hukum bagi masyarakat serta memilih kelompok Kadarkum yang berprestasi dalam pemahaman hukum untuk diikutsertakan dalam Lomba Kadarkum Tingkat Nasional bulan April tahun 2020 di Jakarta.

Melalui Lomba Kadarkum ini diharapkan mampu menciptakan masyarakat yang cerdas hukum dan menjadi pionir dalam pembentukan Desa Sadar Hukum. Diseminasi dan pembudayaan hukum harus dilakukan dari komunitas yang paling kecil yaitu keluarga.

Gubernur menilai ada nilai positif dari Lomba Kadarkum tersebut. Masyarakat menjadi paham akan hukum dan dididik menjadi taat hukum. “Walaupun kita tidak menutup mata bahwa tingkat kejahatan juga cukup tinggi sehingga memerlukan Lomba Keluarga Sadar Hukum”, beber Sugianto.

Lomba Kadarkum tersebut diikuti 14 Kabupaten dan Kota se-Kalteng dengan Dewan Juri dari unsur BNN, Biro Hukum Setda Kalteng, Kejaksaan Negeri dan Pengadilan Negeri Palangka Raya serta Kemenkum HAM Kalteng.***

## Pemerintah Apresiasi Pelibatan Perempuan sebagai Agen Perdamaian

PALANGKA RAYA – Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), bekerjasama dengan Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) Provinsi Kalimantan Tengah, menginisiasi program yang melibatkan perempuan sebagai agen perdamaian. Dialog mengenai "Perempuan Agen Perdamaian", Pelibatan Perempuan dalam Pencegahan Radikalisme dan Terorisme digelar di M Bahalap Hotel Palangka Raya, Kamis (31/10/2019), dan dibuka oleh Asisten II Bidang Administrasi Perekonomian dan Pembangunan Nurul Edy.

Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Fahrizal Fitri, dalam arahan yang dibacakan Asisten II memaparkan, terdapat beberapa faktor kondisional yang berpotensi menimbulkan ekstrimisme, kekerasan, dan radikalisme, antara lain keragaman etnis, agama, dan komunitas lokal yang dapat menimbulkan intoleransi; penanganan konflik yang belum efektif dan terkesan membiarkan; serta perkembangan IPTEK yang menjadikan dunia seolah tak bersekat. "Dengan melihat fakta tersebut, maka perlu dilakukan langkah-langkah antisipasi dalam menyebarluaskan informasi mengenai terorisme kepada seluruh elemen masyarakat termasuk perempuan di berbagai lembaga pendidikan," ungkap Sekda.

Pemahaman tentang ideologi yang salah termasuk ajaran-ajaran radikalisme atau terorisme dinilai sangat membahayakan moral dan pola pikir masyarakat terutama pelajar dan generasi muda. Upaya pencegahan terhadap masuknya paham radikal dapat dilakukan melalui berbagai jalur, antara lain melalui karya-karya seni edukatif yang diproduksi kaum perempuan. "Hal ini dapat dilakukan dengan pembuatan karya-karya seni yang edukatif, kreatif, dan persuasif, seperti pembuatan video pendek yang langsung dikerjakan oleh perempuan sebagai agen perdamaian," jelasnya.

Sekda mengapresiasi program yang diinisiasi BNPT dan diselenggarakan FKPT Provinsi Kalimantan Tengah berkaitan dengan perempuan sebagai agen perdamaian. "Ini sangat bagus untuk memberikan kepada para perempuan dan generasi muda untuk lebih dapat menyalurkan kreativitasnya sekaligus menanamkan paham kecintaan terhadap negara melalui karya yang dihasilkan," papar Sekda.

Sementara itu, acara dialog pelibatan perempuan dalam memerangi radikalisme terorisme ini antara lain dihadiri Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan Yuas Elko, Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah Adi Sutanto, S.H., M.H., Kepala Seksi Partisipasi Masyarakat Direktorat Pencegahan Deputi I BNPT Setyo Pranowo, S.H., M.H. dan rombongan, serta para pengurus FKPT dan rombongan.

Peserta kegiatan sendiri berjumlah sekitar 110 orang yang terdiri atas Perempuan Lintas Agama, Organisasi Masyarakat Perempuan, Perkumpulan Perempuan di lingkungan TNI/POLRI, Lurah/Kades Perempuan, serta perwakilan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.***

## Gubernur Kalteng Apresiasi Kinerja ASN

PALANGKA RAYA – Biro PKP. Gubernur Kalimantan Tengah Sugianto Sabran mengapresiasi dan menyampaikan teri kasihnya atas kinerja Para Pejabat termasuk dukungan para supir di lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah selama kurang lebih tiga tahun masa kepemimpinannya bersama Wakil Gubernur Habib Ismail Bin Yahya. "Intinya kalian adalah orang-orang hebat, tidak ada Gubernur yang sukses tanpa kalian. Saya bisa menilai dari kinerja kalian dalam tiga tahun lebih. Kalian adalah orang-orang hebat di bidangnya," ucap Sugianto Sabran.

Gubernur Sugianto Sabran mengemukakan rasa terima kasih dan penghargaannya itu dalam acara Ramah Tamah dan Syukuran Gubernur Kalimantan Tengah bersama Pejabat Tinggi Pratama, Administrator dan Pejabat Pengawas, Pejabat Fungsional Tertentu dan para Supir Mobil Dinas Jabatan maupun Mobil Dinas Operasional Perangkat Daerah di Halaman Istana Isen Mulang Palangka Raya, Sabtu (19/10/2019).

Pada kesempatan tersebut Sugianto Sabran beserta Ibu Ivo Sugianto Sabran menyempatkan diri menyapa para tamu undangan yang hadir. "Pada intinya, malam ini sudah tiga tahun lebih pemerintahan saya bersama Pak Habib Ismail Bin Yahya. Saya ingin melihat lebih dekat lagi yang eselon III dan IV. Kalau yang eselon II sering ketemu dengan saya. Tapi, yang eselon III dan IV jarang sekali ketemu. Kalau ada permasalahan-permasalahan, itu bisa disampaikan ke Gubernur secara langsung," jelas Sugianto.

Ramah tamah tersebut dimeriahkan artis KDI Eko Bermano dan Lulu Chika.***

# Gubernur Minta Pejabat Jauhi Pungli dan Korupsi

Palangka Raya – Biro PKP. Gubernur Kalimantan Tengah Sugianto Sabran melantik 63 Pejabat Administrator dan 107 Pejabat Pengawas lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah di Aula Eka Hapakat Lantai III Kantor Gubernur Kalimantan Tengah, Jumat (25/10/2019) malam.

Dalam sambutannya, Gubernur Sugianto Sabran mengingatkan kepada para pejabat yang dilantik untuk menjaga amanah dan tidak melakukan pungutan liar (Pungi). “Selaku Gubernur, saya hanya meminta kinerja, kinerja, kinerja, dan sama-sama kita memberantas Pungli. Lebih baik lagi, PAD naik, pembangunan tepat sasaran, efisien, tidak ada korupsi,” imbuhnya.

Gubernur menekankan, tidak ada visi misi masing-masing pejabat, tetapi yang ada adalah visi misi Gubernur. “Kita harus bangkit bersama, kerja keras. Tidak ada kalian membuat program sendiri, yang ada hanya visi misi Gubernur untuk Kalteng dan masyarakatnya,” tegas Gubernur.

Sementara itu, selain melantik pejabat definitif, Gubernur juga menyerahkan Surat Perintah Pelaksana Tugas dan melantik sejumlah pejabat administrator sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) pada beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Sejumlah pejabat yang menerima surat perintah tersebut, antara lain Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah Mofit Saptono yang mendapat mandat sebagai Plt. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah; Kepala Bagian Pembinaan Pengadaan Barang dan Jasa Rahmawati sebagai Plt. Kepala Biro Layanan Pengadaan Barang dan Jasa; Kepala Bagian Bina Pengelolaan Sumber Daya Alam, Produksi, dan Budidaya Said Salim sebagai Plt. Kepala Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam; serta Kepala Bagian Penyusunan dan Pengendalian Program pada Biro Administrasi Pembangunan Norliani sebagai Plt. Kepala Biro Administrasi Pembangunan.

Gubernur mengungkapkan bahwa salah satu prioritas Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah saat ini adalah pendidikan. Infrastruktur dan pendidikan akan dipertajam program dan kegiatannnya pada tahun 2021 untuk menuju SDM unggul dan maju. “Masalah infrastruktur dan konektivitas antara provinsi, kabupaten/kota, dan kecamatan dipertajam. Konektivitas infrastruktur penting karena mempengaruhi pendidikan,” papar Gubernur sembari menambahkan bahwa anggaran daerah untuk bidang pendidikan akan dialokasikan dengan porsi 30-35 persen atau meningkat dibandingkan saat ini sekitar 28 persen.

Para pemangku jabatan di bidang pendidikan pun dituntut membuat terobosan-terobosan untuk meningkatkan kualitas pendidikan, termasuk meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kalimantan Tengah yang saat ini sudah cukup tinggi sekitar 7,42. “SDM inilah yang akan mengubah Kalteng ke depannya. Karenanya, generasi kita setengah abad ke depan harus berubah, tidak lagi tergantung pada sumber daya alam di dalam tanah, tetapi bagaimana mereka mengolah,” jelas Gubenur.

Sementara itu, pelantikan tersebut dihadiri Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Fahrizal Fitri, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Kalimantan Tengah Katma F. Dirun, serta para Kepala OPD, Pejabat Administrator, dan Pejabat Pengawas lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.***

## Gubernur Resmikan Gedung Disperkimtan Kalteng

PALANGKA RAYA – Biro PKP. Gubernur Kalimantan Tengah Sugianto Sabran mengatakan pembangunan sarana perkantoran sudah seharusnya dapat menciptakan suasana kerja yang nyaman dalam rangka meningkatkan kinerja pegawai.“Pembangunan suatu sarana perkantoran memang ada keharusan supaya pegawai bisa bekerja dengan nyaman dan baik. Situasi yang nyaman itu menimbulkan energi positif ketika mengabdikan diri terhadap bangsa dan negara, khususnya di Kalimantan Tengah,” katanya ketika meresmikan Gedung Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DISPERKIMTAN) Provinsi Kalimantan Tengah di Jalan D.I. Panjaitan Nomor : 5 Palangka Raya, Rabu (23/10/2019).

Gubernur mengungkapkan ada beberapa kantor yang sudah tidak layak lagi. Namun dengan keterbatasan APBD yang baru mencapai Rp.5,4 triliun sedangkan luas Kalimantan Tengah begitu besar sehingga Pemerintah Daerah lebih mengutamakan pelayanan kepada masyarakat.“Ada kantor yang sudah turun pondasi lantainya karena sudah puluhan tahun, sudah waktunya dibongkar. Tapi dengan keadaan APBD kita yang begitu kecil dan luasan Kalimantan Tengah yang begitu besar, kita lebih mengutamakan pelayanan kepada masyarakat,” jelasnya.

Sugianto Sabran mengapresiasi upaya renovasi eks gedung Rumah Sakit Jiwa Kalawa Atei menjadi Gedung Disperkimtan yang dinilai cukup memuaskan dan sesuai dengan spesifikasi. “Ini butuh orang-orang yang serius yang mencintai pekerjaannya. Kalau orangnya tidak mencintai pekerjaannya maka kantor itu bisa tidak sesuai dengan spek, tidak rapi, rencananya kurang matang, AC-nya bermasalah, kabel-kabelnya ke sana-kesini dan jaringan komputer tidak sesuai dengan tempatnya,” terang Gubernur.

Sugianto meminta jajaran SOPD juga dapat menjaga kekompakan untuk mengejar ketertinggalan dari provinsi-provinsi lainnya. “Yang ingin saya kejar adalah ketinggalan dari Pulau Jawa dari segi infrastruktur, pendidikan dan kesehatan. Kita akan mengambil terobosan-terobosan di bidang pendidikan. Bagaimana wajib belajar 12 tahun itu tidak ada lagi orang susah, tidak ada yang mau ke SD putus sekolah, yang mau ke SMP putus sekolah, yang mau ke SMA putus sekolah,” beber Sugianto.

Gubernur seusai menandatangani prasasti dan pengguntingan pita menandai peresmian dan pemakaian Gedung Kantor Disperkimtan Provinsi Kalteng itu dilanjutkan dengaan peninjauan lokasi bangunan seluas 2.218 Meter Persegi yang terdiri 2 lantai tersebut.

Renovasi gedung eks RSJ Kalawa Atei menjadi gedung Kantor Disperkimtan Provinsi Kalimantan Tengah itu menelan biaya hingga Rp 12,288 miliar yang terdiri dari biaya perencanaan fisik dengan nilai kontrak Rp 198 juta, biaya rehabilitasi kontruksi fisik tahap I dengan nilai kontrak Rp 7,190 miliar dan biaya rehabilitasi kontruksi fisik tahap II dengan nilai kontrak Rp 4,9 miliar.***

## Pemda Kalteng dan Penyelenggaran PILKADA 2020 Tandatanganii NPHD.

PALANGKA RAYA – BIRO PKP. Pemilihan Kepala Daerah serentak akan dilaksanakan tahun 2020. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 15 tahun 2019 menyebutkan salah satu tahapan PILKADA serentak adalah Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).

“Penandatanganan NPHD yang dilaksanakan pada hari ini merupakan bentuk komitmen pemerintah provinsi Kalimantan Tengah untuk mendukung pelaksanaan PILKADA tahun 2020. Hal ini sebagai wujud kesiapan pemerintah provinsi Kalimantan Tengah dalam mendukung terselenggaranya pesta demokrasi 5 tahunan itu”, tegas Gubernru Kalteng Sugianto Sabran dalam sambutan tertulis disampaikan Plt. Asisten Adminstrasi Umum Sekda Kalteng Kaspinor pada acara Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dengan Penyelenggara Pemilukada tahun 2020 di Palangka Raya, Selasa (01/10/2019).

Pemerintah provinsi Kalimantan Tengah telah menganggarkan dana hibah dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2019 untuk mendukung susksesnya pelaksanaan PILKADA 2020. Dana hibah yang dialokasikan ini merupakan dana penunjang pelaksanaan kegiatan dalam rangka Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah tahun 2020. “Dengan adanya dana hibah ini kami berharap penyelenggaraan PEMILUKADA dapat terlaksana dengan sebaik – baiknya dalam menciptakan pesta demokrasi yang baik. Dana hibah ini dapat dipergunakan dengan prinsip efektif, efisien dan ekonomis serta prinsip transparansi sesuai dengan Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku”, kata Gubernur.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) telah melakukan beberapa kali pembahasan dengan pihak Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) sehingga diperoleh kesepakatan anggaran masing-masing untuk Komisi Pemilihan Umum Rp. 249.796.238.000,- dan untuk Badan Pengawas Pemilihan Umum sebesar Rp. 88.000.000.000,- yang akan direalisasikan secara bertahap sesuai ketentuan dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah tersebut.

Diharapkan dengan telah ditandatanganinya NPHD ini menjadi langkah awal mewujudkan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2020 yang berkualitas dan berintegritas, serta membangun etika dan budaya politik yang sesuai dengan Pancasila dan Undang – Undang Dasar 1945.***

# Kwarda Gerakan Pramuka Kalteng Gelar Gebyar Pesta Siaga

Palangka Raya – Biro PKP. Kepramukaan berperan penting dalam pendidikan karakter anak bangsa Indonesia. Kepramukaan mengajarkan generasi muda dalam pembentukan kepribadian, kecakapan hidup dan akhlak mulia melalui penghayatan dan pengamalan nilai-nilai kepramukaan sehingga dapat menjadi kader bangsa dan kader pembangunan yang beriman, bertaqwa dan berwawasan ilmu pengetahuan dan teknologi serta memiliki tanggung jawab kepada masyarakat, bangsa dan negara.

Demikian ditegaskan Gubernur Kalimantan Tengah dalam sambutan tertulis yang disampaikan Sekretaris Daerah Fahrizal Fitri pada upacara pembukaan Pesta Siaga Kwartir Daerah (Kwarda) Gerakan Pramuka Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2019 di halaman Kantor Gubernur Kalteng, Minggu pagi (13/10/2019).

Gubernur Sugainto Sabran menilai sangat tepat anak-anak peserta Pesta Siaga memilih Gerakan Pramuka sebagai kegiatan Ekstrakurikuler sebagaimana amanat Permendikbud Nomo: 63 Tahun 2014 tentang Pendidikan Kepramukaan sebagai ekskul wajib di Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.“Pentingnya pendidikan kepramukaan ini terutama untuk pembentukan karakter, mental dan watak serta kepribadian yang memiliki semangat bela negara, jiwa patriot, semangat membangun dan sebagai perekat bangsa. Saya harapkan kepada seluruh pelatih, pembina dan orang tua agar bisa saling bekerjasama dalam pembinaan kepramukaan,” ujarnya.

Gubernur mengharapkan Pesta Siaga ini menghasilkan Pramuka Siaga yang disiplin serta menambah wawasan dan pengalaman. “Kegiatan Pesta Siaga yang kita laksanakan sekarang dapat menghasilkan

Pramuka Siaga yang disiplin, setia kawan, sederhana, jujur, cerdas dan penuh semangat serta mengamalkan Dwi Satya dan Dwi Darma. Rangkaian lomba ini juga diharapkan dapat melatih Pramuka Siaga untuk menambah wawasan dan pengalaman serta bekal keterampilan”, imbuhnya.

Sementara itu Ketua Kwartir Daerah (Kwarda) Gerakan Pramuka Kalimantan Tengah Ivo Sugianto Sabran mengharapkan anak-anak Pramuka Siaga dapat menikmati semua kegiatan lomba Pesta Siaga sekaligus sebagai wadah memperbanyak teman dan wawasan. “Anak-anakku, pada hari ini kalian mengikuti Pesta Siaga Ceria. Bunda harapkan, memang nanti ada lomba dan permainan, tapi di sini jadikanlah ajang untuk menambah kawan, wawasan dan pengetahuan. Pokoknya, jadikan lomba-lomba, permainan ini hal yang menyenangkan, jangan menegangkan, kita semua harus senang.” terang Ivo Sugianto Sabran.

Upacara pembukaan Pesta Siaga tersebut dihadiri Wakil Ketua Kwarda Kalteng Mofit Saptono dan Ketua Harian Kwarda Ibnu Elmi AS Pelu serta sejumlah pengurus Kwarda Kalteng, Ketua Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kota Palangka Raya dan Ketua Mabigus se-Kota Palangka Raya yang diikuti 1.064 orang peserta terdiri dari 473 Siaga Putra, 467 Siaga Putri dan 124 Pembina Damping.

Gebyar Pesta Siaga yang berlangsung sehari itu dimeriahkan dengan berbagai lomba antara lain Siaga Mandiri, Siaga Ceria Game, Siaga Mewarnai dan Menggambar serta Siaga Kolase, termasuk edukasi dan sosialisasi mengenai Stunting, Gerakan Ayo Makan Ikan, Pencegahan dan Penanggulangan Bencana dan Gerakan Ayo Minum Susu.***

# Kalteng Siap Suguhkan Destinasi Wisata Kelas Dunia

PALANGKA RAYA – Biro PKP. Di Kalimantan Tengah tahun 2019 tercatat 2 event terpilih dan masuk dalam Calender of Event (CoE) 2019 Kementerian Pariwisata yakni Festival Budaya Isen Mulang dan Festival Babukung. Selain itu juga tercatat 181 event masuk dalam Kalender Event Provinsi Kalteng, 13 Kalender event Kabupaten, 1 Kalender event Kota dan 2 Kalender event dunia termasuk Wonderful Sail to Indonesia di Kumai Kabupaten Kotawaringin Barat.

Padatnya Kalender Event Pariwisata tersebut semakin memacu pemerintah provinsi Kalimantan Tengah terus berupaya membangun infrastruktur pendukung seperti hotel dan kelancaran akses menuju lokasi wisata dalam rangka meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan ke Bumi Tambun Bungai.

Gubernur Kalimantan Tengah mengemukakan hal tersebut dalam sambutan tertulisnya disampaikan Sekda Kalteng Fahrizal Fitri dalam acara Grand Opening M Bahalap Hotel oleh Menteri Pariwisata RI Arief Yahya dan dihadiri Menteri Perdagangan RI Enggartiasto Lukita serta sejumlah Bupati dan Walikota Palangka Raya Fairid Naparin di Palangka Raya, Selasa (1/10/2019).

Sugianto Sabran menjelaskan pemerintah Provinsi Kalteng terus menggenjot percepatan pembangunan termasuk pembangunan Hotel Berbintang dan Non Bintang menyusul peningkatan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara ke Kalimantan Tengah. “Kita patut berbangga dengan berdirinya Hotel Bintang 4 seperti M Bahalap Hotel yang merepresentasikan kearifan lokal Kalteng melalui nama dan ornamennya. Keberadaan hotel-hotel berbintang di Bumi Tambun Bungai dapat memenuhi kebutuhan wisatawan dan pelaku bisnis dengan fasilitas yang sangat memadai untuk penyelenggaraan event-event besar di Palangka Raya”, jelas Sugianto.

Pertumbuhan dunia perhotelan yang sangat menggembirakan dalam tiga tahun terakhir di Kalimantan Tengah merupakan indikator semakin meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan ke Kalimantan Tengah. Dijelaskan, ciri-ciri berkembangnya suatu daerah antara lain dapat dilihat dari berkembangnya perekonomian, pariwisata dan bisnis. “Kalimantan Tengah telah menunjukkan hal tersebut dengan pertumbuhan ekonomi Kalteng Semester I Tahun 2019 mencapai 7,6 %”, beber Gubernur.

Menteri Pariwisata RI Arief Yahya dalam Grand Opening M Bahalap Hotel tersebut menjelaskan 2 event sudah dan akan didukung Kementerian Pariwisata RI yakni Festival Budaya Isen Mulang dan Festival Babukung yang akan digelar 11-13 Oktober 2019.

Arief Yahya menyebutkan Taman Nasional Tanjung Puting dapat menjadi destinasi wisata kelas dunia. “Tanjung Puting bisa membuat Kalteng kelas dunia dan Tanjung Puting menjadi UNESCO Biosfer mulai tahun 1977 yang sudah meratifikasi Konvensi Ramsar (The Convention on Wetlands of International Importance) tahun 2013. Selain itu mendapat penghargaan Indonesia Sustainable Tourism Award 2018 untuk Kategori Lingkungan dari Mark Plus Center for Tourism and Hospitality (MPTH) dan Planet Tourism Indonesia Award dari Kementerian Pariwisata”, ungkap Arief Yahya serta menegaskan Taman Nasional Sebangau juga dapat menjadi destinasi wisata kelas dunia selain Tanjung Puting.

Sementara Kota Palangka Raya untuk Indonesia Sustainable Tourism Award (ISTA) 2019 berhasil meraih 2 penghargaan sekaligus masing-masing Desa Wisata Kereng Bangkirai Kategori Ekonomi Terbaik dan Taman Nasional Tanjung Puting untuk Kategori Lingkungan. “Sebangau Koran River atau Sungai Koran juga mendapatkan ISTA 2019 dengan Kategori Lingkungan. Untuk lingkungan ada 3 level yaitu geopark, biosphere dan world heritage site. Nanti akan saya bantu Tanjung Puting mendapatkan world heritage site agar lebih mudah menjualnya,” imbuh Menpar.

Arief Yahya menegaskan upaya pengembangan pariwisata di Kalteng agar menjadi kelas dunia harus memperhatikan 3 hal yaitu atraksi, aksesibilitas dan amenitas atau akomodasi. Untuk atraksi harus fokus pada ecotourism. “Kalteng bisa menjadi destinasi utama kelas dunia kalau fokus di ecotourism dan itu sudah terbukti. Jumlah Wisman tahun lalu kurang lebih 40 ribu atau 38 ribu dan tahun ini proyeksinya 100 ribu Wisman. Kemana mereka? Nomor satu adalah ke Tanjung Puting. Secara psikologis kalau sudah tembus angka 100 ribu, biasanya tidak terbendung,” jelasnya dengan mencontohkan Sulawesi Utara sekarang sudah menuju angka 500 ribu setelah menembuas angka 100 ribu kunjunganWisman.

Untuk aksesibilitas, Kalteng harus membangun Bandara Internasional dengan kapasitas yang memadai dan yang berkaitan dengan amenitas atau akomodasi juga harus memadai seperti sarana perhotelan. Menteri Pariwisata juga menyarankan Kalteng untuk mengembangkan wisata nomedic susur sungai karena memiliki sesuatu yang unik. “Di sini ada susur sungai. Itu semacam icon world tapi di sungai. Itu bisa dikembangkan dan diakses sekaligus akomodasinya, itu menarik”, katanya seraya menjelaskan saat ini terdapat cara baru berwisata yang disebut nomedic tourism atau lebih khusus lagi disebut glamour camping (Glamping) yang dapat menarik banyak investor.***

# Kalteng Bersiap Hadapi Revolusi Industri 4.0 dan Society 5.0

PALANGKA RAYA – Biro PKP. Revolusi Industri 4.0 membawa gagasan mengenai kekuatan teknologi mutakhir dalam mempengaruhi kehidupan manusia. Sementara super smart society atau society 5.0 membawa gagasan mengenai kekuatan dalam mendorong harmoni antara kecepatan perkembangan teknologi dengan penyelesaian masalah sosial yang dihadapi penduduk dunia saat ini. Era Revolusi industri 4.0 memiliki sisi positif bagi penguatan ekonomi apabila negara siap menghadapinya. Meski demikian, hal ini juga dapat mengancam generasi muda produktif yang tidak inovatif.

Masyarakat Kalimantan Tengah khususnya kaum muda diharapkan dapat beradaptasi dengan perkembangan teknologi tersebut dengan mengusung kearifan lokal seperti tetap berpegang pada Falsafah Huma Betang. Hal ini mengemuka dalam Seminar Nasional dengan tema "Peran Pemuda dalam Membangun dan Memelihara Kalimantan Tengah di Era Revolusi Industri 4.0 dan Society 5.0 Berlandaskan Falsafah Huma Betang" di Aula Kampus STMIK Palangka Raya, Selasa (22/10/2019).

Gubernur Kalimantan Tengah H. Sugianto Sabran dalam sambutannya dibacakan Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik Endang Kusriatun mengharapkan Seminar tersebut dapat menginspirasi serta menggugah pemuda dan seluruh peserta Seminar agar ikut serta dalam memelihara Kalimantan Tengah di Era Industri 4.0 dan Society 5.0. "Untuk membangun kebersamaan hidup dalam Falsafah Huma Betang yang menjadi kebanggaan Kalimantan Tengah," imbuhnya.

Generasi penerus harus mempunyai daya saing atau keunggulan kompetitif dalam rangka menyongsong dan menjawab tantangan global. "Harapan saya kepada pemuda dan peserta seminar untuk bersama-sama mewujudkan cita-cita kita menuju Kalteng Berkah serta mampu mewujudkan peran pemuda dalam ikut serta membangun Kalimantan Tengah agar ke depannya lebih baik dan lebih bermartabat lagi", pungkas Gubernur.

Ketua Komite I DPD RI Agustin Teras Narang sebagai salah satu nara sumber dalam Seminar tersebut berharap pemangku kepentingan di Kalimantan Tengah menjadikan peningkatan kualitas SDM sebagai prioritas yang perlu dicermati berkaitan dengan roadmap Making Indonesia 4.0 yang digagas pemerintah dalam merespon trend industry 4.0. "Hal ini agar seluruh tantangan di balik perkembangan teknologi, baik Revolusi Indutri 4.0 maupun Society 5.0 bisa dihadapi dengan baik," jelasnya.

Menurut Teras Narang, lembaga pendidikan memiliki peran penting dalam mendukung langkah prioritas pemerintah untuk meningkatkan kualitas SDM yang ada. "Spirit Huma Betang dan Balum Bahadat yang mengedepankan kebersamaan mesti dijadikan satu pegangan bersama oleh semua pihak. Pemerintah, akademisi, pelaku usaha dan kelompok masyarakat lainnya harus bergotong-royong menghadapi era Revolusi Industri 4.0," papar mantan Gubernur Kalimantan Tengah tersebut.

Teras pun memberikan masukan terhadap persoalan sosial ekonomi di Kalimantan Tengah yang bisa menjadi sumber ide untuk melahirkan solusi berbasis inovasi teknologi yang didukung dengan peran pemuda yang lebih sadar teknologi, akan sangat menentukan kemajuan daerahnya di era Otonomi Daerah saat ini.***

# Gubernur Kalteng Lantik Kepala SMA, SMK dan SLB Se-Kalteng

Palangka Raya-Biro PKP. Gubernur Kalimantan Tengah Sugianto Sabran melantik 32 orang Kepala Sekolah SMA, SMK dan SLB se-Kalimantan Tengah di Aula Eka Hapakat Palangka Raya, Kamis (23/10/2019).

Gubernur Kalimantan Tengah Sugianto Sabran menegaskan pentingnya kehadiran negara melalui peran pendidikan dalam rangka menyiapkan sumber daya manusia yang memiliki keunggulan kompetetif dalam semua aspek kehidupan. “Bapak-ibu adalah orang-orang yang luar biasa, yang mendidik Sumber Daya Manusia (SDM) masyarakat Kalteng. Yang mendidik anak-anak kita untuk menjadi generasi-generasi unggul, pintar, cerdas, berani, jujur dan berakhlak,” ujar Sugianto.

Gubernur mengatakan pendidikan itu sangat penting. “Orang pintar dan hebat pun, kalau tidak berakhlak, juga percuma. Gubernur, Bupati, Wali Kota wajib menghormati para pendidik, karena di tangan para pendidik inilah Kalteng ke depan mau jadi apa”, kata Sugianto.

Upaya mewujudkan mutu pendidikan telah melahirkan berbagai kebijakan Pemerintah Pusat dan Daerah. Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Bidang Pendidikan melalui 5 (lima) Fokus Kalteng BERKAH yaitu Peningkatan Sarpras Pendidikan;

Peningkatan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan; Peningkatan Pelayanan Pendidikan di Daerah Pedalaman/ Terpencil; Peningkatan Pendidikan Karakter berbasis Kearifan Lokal serta Pendukungan Beasiswa Lulusan SMA/MA/SMK di Perguruan Tinggi.

Terkait hal tersebut, Gubernur menekankan beberapa hal yang harus mendapat perhatian para Kepala Sekolah antara lain Kepsek harus mampu melaksanakan tiga tugas pokok dengan baik yaitu tugas manajerial, supervisi dan tugas kewirausahaan. Guru harus mampu membentuk karakter positif pada diri siswa dengan mendorong terciptanya keseimbangan 3 (tiga) kecerdasan pada diri siswa, yaitu kecerdasan intelegensi, kecerdasan emosional, dan kecerdasan spiritual.

Demikian juga penilaian prestasi siswa agar tidak hanya menghargai prestasi akademik semata, tetapi juga menghargai prestasi karakter kejujuran, tanggungjawab, disiplin kerja keras dan lain-lain sehingga tidak ada satu anakpun yang merasa tidak memiliki prestasi dalam hidupnya. “Untuk itu, manajemen sekolah harus adaptif dan akomodatif serta responsif dengan perkembangan globalisasi teknologi informasi yang terus terjadi. Pendidikan di Kalteng harus berani melakukan inovasi untuk peningkatan mutu dan daya saing”, tegas gubernur.

Sugianto Sabran juga meminta Kepala Sekolah se-Kalteng agar fokus pada peningkatan mutu pendidikan masing-masing sekolah dan tidak ikut mengambil bagian dalam mengurusi proyek apapun.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kalimantan Tengah Katma F. Dirun mengatakan pelantikan Kepala SMA, SMK dan SLB se-Kalteng ini dalam rangka penyegaran suasana kepemimpinan. “Namun yang paling utama adalah proses transformasi pengetahuan dan keahlian Kepala Sekolah yang dinilai mumpuni dan kompeten di bidangnya, termasuk di dalamnya adalah kompeten dari sisi sosio kultural yang nantinya diharapkan akan diterapkan pada satuan pendidikan”, terang Katma F. Dirun.***

# Wisuda Pascasarjana Ke IV, Sarjana Ke XXVII dan Diploma Ke XVII Universitas Muhammadiyah Palangka Raya Tahun 2019

Semua perguruan tinggi baik di Indonesia maupun di seluruh dunia, pada hakikatnya mempunyai visi yang sama, yaitu menjadi pusat keunggulan (excellence). Karena itu, kompetisi antar perguruan tinggi akan semakin ketat dalam mewujudkan visi untuk pengejawantahan dari harapan masyarakat. Secara konkrit harapan masyarakat terhadap perguruan tinggi adalah tempat untuk mendapatkan pendidikan yang bermutu dengan biaya pendidikan yang terjangkau, menghasilkan lulusan yang mudah mendapatkan atau dapat menciptakan lapangan kerja, sebagai lembaga yang berkontribusi di dalam memecahkan berbagai persoalan sains, teknologi, sosial, ekonomi dan budaya, dan sebagainya.

Hal itu sangat relevan dengan amanat pendiri pergerakan ini yaitu Bapak KH Ahmad Dahlan dengan kata katanya "Hidupilah Muhammadiyah, dan jangan Engkau hidup dari Muhammadiyah". Namun dalam konteks sekarang ini bisa saja kemudian dirangkai menjadi kalimat; "Hidupilah Muhammadiyah, maka Engkau pun bisa ikut hidup bersama Muhammadiyah."

"Kita semua tentu berharap pada kampus ini untuk terus berkarya terutama dalam membentuk kapasitas diri terhadap semua mahasiswa yang saat ini menuntut ilmu dan menjalani transformasi ilmu pengetahuan dari semua !Program Studi dan semua Fakultas yang ada di Universitas Muhammadiyah Palangka Raya. Kepada semua dosen tetap yayasan yang terus bekerja dengan penuh dedikasi, kita semua juga berharap mereka juga terus berkarya dan mengabdikan diri untuk kampus ini menuju "academic excellence" dan juga kebanggaan masyarakat Kalimantan Tengah. Sedangkan kepada para wisudawan/ wisudawati yang hari ini telah diwisuda, Saya mengucapkan selamat atas prestasinya, Saudara telah menjalani proses perkuliahan hingga meraih gelar dan semoga dapat menjadi bekal berharga untuk selanjutnya belajar di arena sebenarnya yaitu "belajar dari kehidupan" dan mengabdikan diri pada masyarakat dan bangsa", ungkap Gubernur Kalimantan Tengah Sugianto Sabran dalam sambutannya yang dibacakan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Fahrizal Fitri Pada Acara Wisuda Pascasarjana Ke IV, Sarjana Ke XXVII dan Diploma Ke XVII Universitas Muhammadiyah Palangka Raya Tahun 2019, Rabu (30/10/29).

Rektor Universitas Muhammadiyah Palangkaraya juga memberikan ucapan selamat kepada seluruh peserta wisudawan/wisudawati yang berjumlah 786 orang. "Selamat kepada para wisudawan/ wisudawati dan sah menjadi alumni Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, terima kasih karena telah memilih Universitas Muhammadiyah Palangkaraya menjadi tempat menempuh pendidikan", tambah Sonedi.

Saat ini sangat diperlukan orang-orang yang memiliki kecerdasan, tidak hanya kecerdasan intelektual, namun harus dilengkapi dengan kecerdasan emosional, kecerdasan menghadapi tantangan hidup secara arif, serta kemampuan mengembangkan intuisi yang dilandasi pada nilai-nilai spiritual, ]uga nilai-nilai budaya dan kearifan lokal yang telah ada dan bernilai positif untuk kita kembangkan bersama.

"Kepada para wisudawan/ wisudawati Saya berpesan bahwa wisuda Saudara saat ini merupakan langkah awal untuk memasuki medan baru untuk menerapkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan yang Saudara peroleh. Bagi yang akan memasuki lapangan kerja hendaknya selalu

berupaya meningkatkan mutu diri. Perlu diketahui bahwa untuk mendapatkan pekerjaan saat ini anda harus mampu bersaing, untuk memenangkan persaingan, hanya mereka yang bermutu lah yang menang dan kepada Saudara yang telah bekerja, tingkatkan kemampuan dan mutu anda. Dunia kerja menuntut adanya orang-orang jujur, disiplin, dan profesional. Ketiga hal itu merupakan modal utama untuk menjadikan Saudara mampu mengatasi tantangan yang ada, yang pada gilirannya anda akan diakui sebagai orang bermutu. Orang bermutu dilihat pada dua indikator, yaitu terpenuhinya standar kualifikasi yang ditentukan, dan pengakuan yang baik dari pemakai. Kedua hal itu Saudara harus bisa mewujudkannya. Saat ini Saudara baru pada indikator pertama, yang kedua masih harus melalui proses perjalanan waktu, saat Saudara bekerja nanti. Ingat, bisa saja syarat pertama terpenuhi, namun syarat kedua tidak terpenuhi", tegas Gubernur.

Selanjutnya dalam upaya mewujudkan Kalimantan Tengah maiu, mandiri dan adil untuk kesejahteraan segenap masyarakat menuju KALTENG BERKAH (Bermartabat, Elok, Religius, Kuat, Amanah dan Harmonis). "Saya berharap kepada civitas akademika Universitas Muhammadiyah Palangka Raya serta semua elemen masyarakat Kalimantan Tengah untuk mendukung dan mengawal agar kita semua dapat mewujudkan cita-cita kita bersama yaitu KALTENG BERKAH", terang Sugianto.***

# Festival Kesatuan Pengelolaan Hutan Kalimantan Tengah Tahun 2019

Hutan adalah anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karenanya pengurusan hutan harus dilakukan secara berkesinambungan bagi kesejahteraan masyarakat, baik generasi sekarang maupun yang akan datang, sejalan dengan mandat Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional yang mewajibkan agar bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kompleksitas dan dinamika Pengurusan Hutan dihadapkan pada permasalahan pokok, antara lain eksploitasi SDA belum sepenuhnya peningkatan kesejahteraan masyarakat, pengelolaan SDA yang dinilai tidak memenuhi rasa keadilan daerah,menurunnya kualitas hutan sebagai sumberdaya dan kehilangan habitat dan degradasi, kualitas sumberdaya air menurun, sungai, pesisir pantai, dan menurunnya sumber daya air tanah, tekanan dan dampak pembangunan terhadap sumberdaya alam, konflik dalam pemanfaatan SDA dan Pemanfaatan secara ilegal,dinamika partisipasi masyarakat belum terkelola dengan baik atau baru dimulai, pergulatan antara kebutuhan Formal dengan Substansial, dalam kelola kepentingan menyangkut SDA khususnya hutan dan tata ruang dan dukungan kelembagaan belum utuh.

"Dengan berpedoman pada RPJMD Provinsi Kalteng Tahun 2016 2021 dan Rencana Strategis Kehutanan perlu kita cermati dan sikapi bersama untuk mengatasi permasalahan tersebut. Diharapkan kedepannya Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah beserta jajarannya termasuk KPH dapat merancang program kegiatan mengacu pada visi misi pemerintah pusat dalam mendukung visi misi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, dan mencermati visi misi Pemerintah Kabupaten/Kota agar bisa saling sinergis dalam pengelolaan hutan. Diharapkan pembangunan KPH dapat meningkat kedepannya sebagai bagian dari upaya penyelamatan hutan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta pembangunan daerah," tegas Gubernur Kalimantan Tengah Sugianto Sabran dalam sambutannya yang dibacakan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Fahrizal Fitri Pada Festival Kesatuan Pengelolaan Hutan Kalimantan Tengah Tahun 2019 di Palangka Raya, Rabu (30/10/19).

Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) merupakan salah satu jawaban atas berbagai permasalahan seperti' disebutkan sebagai pengelola hutan pada tingkat tapak. Kita patut syukuri 33 Unit KPH yang telah ditetapkan wilayahnya di kawasan Hutan Produksi dan kawasan Hutan Lindung menurut Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.2/ MENHUT-II/2012, dapat kita bentuk kelembagaan KPH di Kalimantan Tengah sejumlah 18 Unit Pelaksana Teknis (UPT) KPH pada Dinas Kehutanan Kalimantan Tengah yang mengelola 33 Unit KPH tersebut, dengan menerbitkan Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2017 sejalan dalam melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pembentukan kelembagaan tersebut mempertimbangkan kemampuan dukungan anggaran yang masih sangat terbatas dari anggaran Pemerintah Pusat dan APBD Kalimantan Tengah, termasuk jumlah SDM yang ideal dalam mengelolanya. KPH juga menjadi pendorong perwujudan pengelolaan hutan berkelanjutan, pembangunan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Saya meminta KPH mampu menjadi bagian dalam proses-proses pemberdayaan masyarakat dan harus mendorong inovasi program Perhutanan Sosial (PS) di wilayahnya masing - masing. Selain itu, sebagai anggota tim inventarisasi dan verifikasi (inver) penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan (PPTKH) dan program Tanah Objek Reformasi Agraria (TORA), KPH harus berperan aktif dalam proses tersebut. KPH juga harus aktif melakukan pencegahan karhutla, terutama di wilayah kelola KPH yang rawan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Yang tidak kalah penting adalah merancang dan mendesain kegiatan pengelolaan hutan, harus benar-benar berdasarkan kebutuhan-kebutuhan lapangan, serta dengan memperhatikan skala prioritas yang Obyektif dan selalu mengacu pada Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP) yang telah disusun.

"Saya berharap Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah sebagai instansi induk KPH dapat melakukan evaluasi dan identifikasi permasalahan keberlanjutan operasionalisasi KPH di lapangan. Melalui kegiatan Festival KPH dalam rangka Launching KPH Center dan pelepasan produk KPH ini diharapkan dapat mewujudkan komitmen penguatan kelembagaan dan keberlanjutan operasionalisasi atas pelaksanaan program prioritas nasional dan kebijakan daerah dalam pemanfaatan hutan, rehabilitasi hutan, perhutanan sosial, kemitraan lingkungan, penanggulangan kebakaran lahan dan hutan, serta implementasi TORA", ungkap Gubernur.

Kesatuan Pengelolaan Hutan Center dibentuk sebagai upaya untuk mempercepat operasionalisasi dan pengembangan KPH di Provinsi Kalimantan Tengah dengan komposisi Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah, Universitas Muhammadiyah Palangka Raya, UPT Kementrian KLHK di Kalimantan Tengah, Komda APHI Kalimantan Tengah, GGGI (Global Greenn Growth Institute) WWF-Indonesia, USAID - Lestari dan UPT KPH. "Berdasarkan kesepakatan bersama para pihak KPH Center bahwa tempat KPH Center pada saat ini berada di lokasi lingkungan Mess KKMA Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah di Jalan Yos Sudarso, Palangka Raya", terang Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah Sri Suwarno.

Dengan Launching KPH Center Kalimantan Tengah diharapkan dapat memberikan solusi untuk menghadapi hambatan dan tantangan, dalam operasionalisasi KPH, serta terbentuknya penguatan kerjasama antar lembaga dan para pihak, serta prospek pengembangannya, termasuk tantangan mempersiapkan KPH menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) kedepannya. Dengan demikian KPH dapat menjadi institusi kunci untuk mewujudkan kelestarian hutan dan kesejahteraan masyarakat.***

# Pembukaan Lomba - lomba Memperingati Hari Kesehatan Nasional ke 55 Tahun 2019

Kesehatan bagi kita semua termasuk generasi muda harapan bangsa tidak terlepas dari pengertian kesehatan secara umum. Kesehatan di sini meliputi kesehatan badan, rohani, dan sosial, tidak terbatas hanya bebas dari penyakit, cacat, dan kelemahan. Tentu saja perkembangan seorang anak semestinya berjalan selaras dengan keadaan pada umumnya orang lain.

Dalam rangka menjelang Hari Kesehatan Nasional ke 55 tahun 2019 tanggal 12 November 2019, Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah mengadakan lomba Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS) bagi peserta didik kelas 1 SD/MI sederajat se kota Palangka Raya, lomba mewarnai bagi peserta kelas I-III SD/MI sederajat se kota Palangka Raya dan Lomba Penyuluhan Penyuluhan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) bagi peserta didik kelas VII dan VIII SMP/MTS sederajat se kota Palangka Raya dengan peserta kurang lebih berjumlah 500 orang.

"Dengan adanya lomba -lomba ini, mudah mudahan dapat memacu semangat bapak ibu serta anak anakku sekalian untuk dapat setiap saat menerapkan gaya hidup sehat di lingkungan sekitarnya. Sehingga dapat menciptakan generasi penerus bangsa yang berkualitas. Hal ini sejalan dengan tema hari Kesehatan Nasional ke 55 tahun 2019 yaitu Generasi Sehat, Indonesia Unggul. Selain itu pula, dengan adanya generasi bangsa yang berkualitas maka akan dapat mewujudkan visi dan misi Bapak Gubernur yakni Kalteng BERKAH (Bermartabat, Elok, Religius, Kuat, Amanah dan Harmonis)", ungkap Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Kalimantan Tengah Ivo Sugianto Sabran dalam sambutannya yang dibacakan oleh Wakil Ketua Tim Ketua Penggerak PKK Nor Hayati Fahrizal Fitri Pada Acara Pembukaan Lomba - lomba Hari Kesehatan Nasional ke 55 Tahun 2019 di Palangka Raya, Kamis (24/10/19).

Pada saat ini di Kalimantan Tengah sedang menghadapi masalah kesehatan yaitu Stunting. Stunting adalah masalah gizi kronis yang disebabkan oleh asupan gizi yang kurang dalam waktu lama, umumnya karena asupan makanan yang tidak sesuai kebutuhan gizi.

Stunting terjadi mulai dari dalam kandungan dan baru terlihat saat anak berusia dua tahun. Ada berbagai penyebab stunting antara lain : faktor lingkungan, faktor sosial budaya, faktor ekonomi , faktor pendidikan dan lain sebagainya. Salah satu cara untuk mencegah stunting adalah dengan perubahan perilaku, perilaku yang sederhana yang dapat kita ajarkan dan tanamkan sejak dini kepada anak anak kita yaitu cuci tangan pakai sabun. Karena tangan adalah anggota tubuh yang paling sering bersentuhan dengan benda di sekitar dan berhubungan langsung dengan mulut, hidung, telinga dan selaput lendir mata. Oleh karena itu, cuci tangan pakai sabun (CTPS) sangat penting untuk dilakukan pada saat-saat sebelum makan pagi, siang, malam, saat mandi dan setelah dari toilet.

CTPS merupakan upaya yang mudah dan murah, namun belum banyak masyarakat yang menjadikan cuci tangan pakai sabun (CTPS) sebagai kebiasaan untuk menjaga kesehatan. Perlu juga bagi anak anak kita untuk meningkatkan pengetahuan tentang Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). Selain untuk dirinya sendiri, juga perlu untuk berbagi dengan teman sesamanya di sekolah. Dengan pengetahuan tentang PHBS yang dimiliki oleh anak didik serta penerapannya di rumah maupun di sekolah niscaya baik dirinya sendiri maupun teman teman sekolahnya akan merasakan manfaatnya bagi kesehatan. Antara lain tidak mudah sakit, selalu bugar, konsentrasi dalam belajar dan lain lain.***

## Proyek Pembangunan RS Kelas A di Kalteng Masuki Tahap Penyiapan

PALANGKA RAYA – Proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) Pembangunan Rumah Sakit Kelas A di Provinsi Kalimantan Tengah telah memasuki Tahap Penyiapan, yakni penyusunan Outline Business Case (OBC)/ Kajian Awal Prastudi Kelayakan dan Final Business Case (FBC)/ Kajian Akhir Prastudi Kelayakan.

Sebagai langkah tindak lanjut, Tim Simpul KPBU dan Tim KPBU menggelar rapat dengan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PT PII) dan Tim Konsultan OBC Proyek Pembangunan RS Kelas A Provinsi Kalimantan Tengah di Ruang Rapat BKPRD Bappedalitbang Provinsi Kalimantan Tengah, Selasa (29/10/2019).

Kegiatan yang dibuka Kepala Bappedalitbang Provinsi Kalimantan Tengah Ir. Yuren S. Bahat, M.M., M.T. tersebut dihadiri Kepala Badan Keuangan Daerah Drs. H. Nuryakin, M.Si., Kepala Biro Hukum Saring, S.H., M.H., anggota Tim Simpul KPBU lainnya, Tim KPBU, perwakilan PT PII Pratomo dan tim, serta perwakilan Tim Konsultan OBC Zulfikar dan tim.

Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Fahrizal Fitri, dalam sambutan yang dibacakan Kepala Bappedalitbang Provinsi Kalimantan Tengah menyampaikan bahwa Gubernur Kalimantan Tengah selaku Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK) Proyek KPBU RS Kelas A Provinsi Kalimantan Tengah telah menerima fasilitasi pendampingan pembuatan OBC dari Bappenas. “Kajian Awal Prastudi Kelayakan atau Outline Business Case—OBC dijadwalkan selesai akhir Bulan Oktober ini,” jelasnya.

PII telah menyampaikan surat kepada Gubernur tertanggal 25 Oktober 2019 perihal Penyampaian Formulir Penyaringan Proyek untuk Proses Penjaminan Pemerintah atas Proyek KPBU RSUD Doris Sylvanus Kalimantan Tengah. “Kita jadwalkan pada tahun 2020 proyek KPBU RS Kelas A di Provinsi Kalimantan Tengah masuk tahap transaksi, yakni proses lelang konsultan pendamping dan pengadaan Badan Usaha sampai penandatanganan perjanjian dan financial close. Selanjutnya tahun 2021 diharapkan pembangunan fisik atau tahap konstruksi sudah dilaksanakan,” imbuhnya.***

## Ketua TP PKK Kalteng Resmikan Posyandu Lansia Ar Rasyid

PALANGKA RAYA – Biro PKP. Keberadaan Posyandu Lansia sangat penting untuk membina kesehatan para Lansia termasuk pemantauan kesehatan dan penyakit tidak menular seperti diabetes. Untuk itu Tim Penggerak PKK Kalimantan Tengah akan membantu mengalokasi anggaran bagi kegiatan Posyandu Lansia dalam rangka meningkatkan peran aktif Posyandu. “Ke depan akan kami anggarkan untuk bantuan Posyandu Lansia karena ini sangat positif kegiatannya,” jelas Ketua TP PKK Kalteng Yulistra Ivo Sugianto Sabran pada peresmian Posyandu Lansia Ar Rasyid di Jl. G.Obos XVIII Palangka Raya, Minggu (13/10/2019).

Yulistra Ivo menyatakan apresiasinya atas pemanfaatan Posyandu Lansia Ar Rasyid tersebut. “Saya sangat mengepresiasi kegiatan di majelis taklim Ar Rasyid ini karena seperti kita tahu Posyandu adalah pusat pelayanan terpadu atau pelayanan kesehatan yang paling dekat dengan masyarakat. Di sini ada pemantauan gizi dan konseling atau konsultasi kesehatan. Karena ada pengajian, di sini juga ada kajian rohani,” ujarnya.

Posyandu Lansia Ar Rasyid merupakan Posyandu pertama dan satu-satunya di RT 04 RW 06 Kelurahan Menteng. Dana operasionalnya masih dihimpun secara swadaya dari iuran pengajian ibu-ibu Masjid Ar Rasyid. Pengurus Posyandu berharap pemerintah mengucurkan dana untuk membantu kelancaran pelayanan Posyandu dilaksanakan pada pekan kedua setiap bulannya.

Posyandu Lansia dengan tagline “Posyandu Lansia Ar Rasyid, Hidup Sehat, Bahagia” ini tidak terbatas bagi para jemaah pengajian dan keluarganya saja, tapi terbuka untuk umum. Diharapkan melalui Pelayanan aktif Posyandu Lansia ini kualitas hidup Lansia semakin meningkat, Lansia lebih sehat, aktif dan produktif sehingga Lansia bisa lebih sejahtera, bahagia dan berdaya guna bagi diri sendiri, keluarga dan masyarakat dalam rangka membantu pencapaian visi dan misi di bidang kesehatan. Yulistra Ivo juga menyerahkan buku kesehatan secara simbolis kepada perwakilan lansia yang diterima Nyonya Inem dan Hajah Nurhana.

Peresmian Posyandu Ar Rasyid tersebut dihadiri Wakil Direktur RSUD dr. Doris Sylvanus Palangka Raya dr. Theodorus Sapta Atmadja, Kepala Puskermas Menteng Sri Hartinah, Lurah Menteng Kamala Ratna, Ketua Posyandu Lansia Ar Rasyid Dewi Kartika dan sejumlah pengurus TP PKK Kalimantan Tengah.***

# Rapat Koordinasi Evaluasi Pelaksanaan Program 8 Aksi Konvergensi Percepatan Pencegahan Stunting Tahun 2019 dan Rencana Tindak Lanjut Tahun 2020 di Provinsi Kalimantan Tengah

"Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menyambut baik kegiatan ini, mengingat saat ini Indonesia sedang menghadapi tantangan utama dalam pengendalian penyakit yakni adanya transisi epidemiologi. Hal ini menyebabkan munculnya beban ganda di Indonesia terkait pengendalian penyakit menular yang belum selesai, sedangkan di sisi lain kasus penyakit tidak menular meningkat", terang Gubernur Kalimantan Tengah Sugianto Sabran dalam sambutannya yang dibacakan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Fahrizal Fitri Pada Rapat Koordinasi Evaluasi Pelaksanaan Program 8 Aksi Konvergensi Percepatan Pencegahan Stunting Tahun 2109 dan Rencana Tindak Lanjut Tahun 2020 di Provinsi Kalimantan Tengah, Kamis (31/10/19).

Status gizi dan kesehatan ibu dan anak merupakan penentu kualitas sumber daya manusia, status gizi dan kesehatan ibu pada masa pra hamil, saat kehamilannya dan saat menyusui merupakan periode yang sangat kritis atau yang kita kenal dengan 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK). Begitu juga dengan status gizi remaja putri atau pra nikah memiliki kontribusi besar pada kesehatan dan keselamatan kehamilan serta kelahiran apabila remaja putri menjadi ibu.

Periode 1000 HPK ini merupakan periode sensitif karena akibat yang ditimbulkan terhadap bayi pada masa ini akan bersifat permanen dan tidak dapat dikoreksi. Dampak buruk yang dapat ditimbulkan adalah masalah gizi pada periode tersebut adalah jangka pendek yaitu terganggunya perkembangan otak, kecerdasan, gangguan pertumbuhan fisik dan gangguan metabolisme dalam tubuh, jangka panjang yaitu berakibat terjadinya STUNTING, menurunnya

kemampuan kognitif dan prestasi belajar, menurunnya kekebalan tubuh sehingga mudah sakit, dan resiko tinggi munculnya Diabetes, kegemukan, penyakit jantung dan pembuluh darah, stroke, kanker dan disabilitas pada usia tua serta kualitas kerja yang tidak kompetitif. Ini berakibat pada rendahnya produktivitas ekonomi. Jika SDM kita tidak berkualitas, otomatis tidak bisa bersaing dengan bangsa lain, mengingat persaingan global semakin wajib diperhitungkan dengan kualitas kemampuan individu. Pengaruhnya adalah minimnya penghasilan dan perputaran ekonomi di sekitarnya. Harapan kita tentunya hal seperti itu tidak akan terjadi. Masyarakat Kalimantan Tengah harus sehat, cerdas dan kreatif sehingga kita bisa bersama-sama bersatu membangun KALTENG BERKAH (Bermartabat, Elok, Religius, Kuat, Amanah dan Harmonis).

Masalah gizi merupakan masalah yang kompleks, tidak semata mata karena kurangnya asupan makanan tapi juga oleh pola konsumsi dan penyakit infeksi (penyebab langsung) tapi juga oleh ketersediaan dan pola konsumsi rumah tangga, kesehatan lingkungan dan pola asuh, daya beli dan pengetahuan tentang gizi seimbang (penyebab tidak langsung.

Pada saat ini telah terjadi perubahan pola konsumsi yang mengarah pada makan tinggi karbohidrat dan tinggi lemak. Bila kita tarik ke belakang, akar masalahnya berada di luar sektor kesehatan. Ketimpangan pendapatan juga berpengaruh, yang kaya semakin kaya, Indonesia rentan terhadap kenaikan harga pangan yang tidak terbeli oleh golongan ekonomi rendah, ini berakibat kerawanan pangan rumah tangga. Ini menunjukkan bahwa Ketahan Pangan di Suatu Wilayah tidak menjamin Ketahanan Pangan Rumah Tangga.

Kompleksitas gizi ini merupakan tantangan besar untuk menjadikan gizi sebagai isu sentral dalam memperbaiki SDM. Dalam rangka percepatan perbaikan gizi Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi yang fokus pada 1000 HPK. Gerakan ini merupakan upaya bersama antara Pemerintah dan Masyarakat melalui penggalangan partisipasi dan kepedulian pemangku kepentingan secara terencana dan terkoordinasi.

Sasaran yang ingin dicapai pada akhir tahun 2025 adalah menurunkan proporsi anak balita yang stunting sebesar 40% , menurunkan proporsi anak kurus (wasting) kurang dari 5%,menurunkan anak lahir berat badan rendah (BBLR) sebesar 30%, tidak ada kenaikan proporsi anak gizi lebih,menurunkan proporsi ibu usia subur yang anemia sebanyak 50% 6 dan meningkatkan persentase ibu yang memberikan ASI eksklusif selama 6 bulan kurang dari 50%.

Saat ini sebuah tantangan besar masih perlu kita jawab. Upaya pencapaian target MDG's di tahun 2015 masih belum optimal dan akan dilanjutkan dengan upaya-upaya pencapaian SDG's. Khusus untuk sektor kesehatan, perbaikan gizi masyarakat menjadi salah satu targetnya sebagai upaya mencapai komitmen global serta peningkatan kualitas SDM ke depan. Arah pembangunan kesehatan Indonesia dari tahun ke tahun didorong ke arah upaya promotif dan preventif serta peningkatan Universal Coverage menuju masyarakat sehat yang mandiri dan berkeadilan. Kalau kita cermati bahwa kontribusi intervensi gizi sensitif (di luar kesehatan) terbukti berperan besar terhadap penanggulangan masalah gizi, Saya menghimbau dalam forum rapat ini agar upaya perbaikan gizi di sektor kesehatan selalu didukung oleh sektor non kesehatan.

Menjadi salah satu point penting adalah perbaikan gizi dengan pendekatan keluarga yaitu Usaha Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat yang didasari oleh data dan informasi prom kesehatan keluarga melalui kunjungan rumah. Ini merupakan proses pembelajaran berkelanjutan. Tapi semua ini akan sia-sia jika tanpa adanya tindakan berkelanjutan berupa pemantauan dan evaluasi.

"Marilah kita mendukung terwujudnya gizi seimbang menuju bangsa sehat berprestasi dan percepatan perbaikan gizi 1000 HPK. Saya percaya, dengan upaya yang maksimal, kita akan mampu mencapai hasil yang lebih baik di masa depan asalkan kita dengan sungguh-sungguh melakukannya. Dengan memohon kepada Tuhan Yang Maha Esa agar berkenan memberikan bimbingan dan meridhoi semua usaha luhur kita dalam mewujudkan manusia Indonesia yang sehat, produktif dan berdaya saing khususnya masyarakat Kalimantan Tengah yang Bermartabat, Elok, Religius, Kuat, Amanah dan Harmonis", ungkap Gubernur. ***

# Gubernur : Keberhasilan Diraih Dengan Tekad, Komitmen dan Kerja Keras.

Palangka Raya – Biro PKP. Kabupaten Kotawaringin Barat dalam memasuki Hari Jadi Ke- 60 tahun pada tanggal 3 Oktober 2019, berhasil meraih berbagai prestasi pembangunan khususnya dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi mencapai 6,83 % pada tahun 2018 dan Gini Ratio 0,31. Demikian juga persentase penduduk miskin di Kotawaringin Barat berhasil dikurangi hingga 4,27 % pada tahun 2018, sedangkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Kotawaringin Barat terus mengalami peningkatan mencapai 74,46.

Keberhasil yang diraih pemerintah dan masyarakat Kotawaringin Barat tersebut tidak terlepas dari berbagai inovasi dalam memberikan layanan yang optimal kepada masyarakat, keterbukaan informasi publik serta tatakelola pemerintahan yang menggunakan prinsip akuntabilitas dan transparansi. “Tekad, komitmen dan kerja keras inilah yang Saya yakini sebagai bentuk perhatian dan ketulusan pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat sehingga mampu meraih berbagai keberhasilan”, jelas Gubernur Kalimantan Tengah Sugianto Sabran pada Peringatan Hari Jadi Ke-60 Kabupaten Kotawaringin Barat di Pangkalan Bun, Kamis (03/10/2019).

Berbagai keberhasilan pembangunan yang telah dicapai pemerintah dan masyarakat Kotawaringin Barat itu harus dipertahankan bahkan ditingkatkan lagi. “Mari membangun kebersamaan, kembangkan dan tingkatkan budaya gotong royong, keterbukaan dan kesetaraan serta saling menghormati dalam filosofi HUMA BETANG dan BELUM BAHADAT”, kata Sugianto Sabran.

Pemerintah provinsi Kalimantan Tengah tahun 2019 telah mengucurkan dana APBD kepada pemerintah Kabupaten dan Kota se-Kalteng termasuk kepada pemerintah dan masyarakat Kabupaten Kotawaringin Barat sekitar Rp. 500 Miliar untuk pembangunan infrastruktur bidang Bina Marga, Cipta Karya dan Sumber Daya Air.

Dukungan dana pembangunan kepada pemerintah Kabupaten dan Kota se-Kalteng melalui dana APBD Provinsi Kalteng tersebut dalam rangka mempercepat pembangunan infrastruktur dan apresiasi atas keberhasilan pemerintah daerah setempat. “Bekerjalah secara profesional dan penuh integritas, selalu bersinergi dengan pemerintah provinsi dan pusat untuk menciptakan kemakmuran masyarakat. Jadikan momentum Hari Jadi Kotawaringin Barat ini untuk membangun semangat baru dan selalu mengedepankan kebersamaan dalam mewujudkan keberhasilan pembangunan Kabupaten Kotawaringin Barat”, tegas Sugianto.

Gubernur juga mengharapkan peran tokoh adat, tokoh agama dan tokoh masyarakat termasuk relawan dan ormas bersama pemerintah, TNI dan Polri agar mengoptimalkan upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di daerahnya masing-masing. Sebagaimana diketahui bahwa karhutla telah menimbulkan kerusakan dan kerugian lingkungan sumber daya alam, kesehatan dan ekonomi bagi masyarakat, pemerintah dan negara.***